BPR PERDHANA
PT. BPR PERMATA DHANAWIRA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2025

KANTOR PUSAT
Jl. Jamika No. 120, Bandung
Tlp : 022 - 6125 600

KANTOR CABANG
Ruko Padayungan No. 10,
Jl. Perintis Kemerdekaan, Tasikmalaya
Tlp : 0265 - 2354 922

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Jamika no 120, Bandung
Nomor Telepon	(022)6125600
Penjelasan Umum	BPR menerapkan prinsip Transparansi dimana BPR menyampaikan laporan bulanan secara berkala sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada OJK melalui Apolo, melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengambilan keputusan yang strategis dan dibuatkan notulen rapat, menerapkan prinsip akuntabilitas dimana pemenuhan struktur organisasi BPR pada tahun 2025 sudah memadai sehingga terdapat kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR hingga pengelolaannya berjalan secara efektif, menerapkan prinsip responsibility dimana dalam kegiatan operasional BPR sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan dan pengelolaan BPR yang sehat, dan menerapkan prinsip independensi dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dekom, Direksi, dan seluruh organ BPR bebas dari intervensi tanpa tekanan dari pihak manapun, serta menerapkan prinsip fairnes dimana BPR menerapkan prinsip perlakuan yang adil setara dan tidak diskriminatif. BPR telah mempunyai susunan pengurusan yang lengkap yaitu memiliki 1 Komisaris Utama, 1 Komisaris, 1 Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan 1 Direktur bisnis.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yg secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yg memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. BPR mulai konsisten untuk menerapkan tata kelola perusahan yang baik dan menjamin peningkatan kualitas dalam penerapan tata kelola. Diharapkan dengan penerapan Tata kelola yang baik dapat meningkatan baik kinerja keuangan dan non keuangan secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Diana Feronika Sandjaja
	Jabatan	:	Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam perannya sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 2. Membuat Rencana Bisnis Bank dan menjalankan serta mengevaluasi hasil rencana kerja. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Dekom dan OJK. 4. Menetapkan kebijakan Penerapan Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Perlindungan Konsumen 5. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
2.	Nama	:	Candra Purnama
	Jabatan	:	Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat Rencana Bisnis Bank dan menjalankan serta mengevaluasi hasil rencana kerja. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Dekom dan OJK. 4. Menetapkan kebijakan Penerapan Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Perlindungan Konsumen 5. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Hans Yanuar Gunawan
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk memastikan bahwa BPR telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 3. Mengambil keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak Terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional. 4. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi PE Audit Intern , Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK 6. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
2.	Nama	:	Herry
	Jabatan	:	Komisaris

	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk memastikan bahwa BPR telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 3. Mengambil keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak Terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional. 4. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi PE Audit Intern , Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK 6. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

3. Pejabat Eksekutif

Nama dan Jabatan Pejabat Eksekutif					
1.	Nama	: Melisa Chandra	4.	Nama	: Putra
	Jabatan	: PE Kepala Bisnis		Jabatan	: PE Audit Internal
2.	Nama	: Nelly Sonia	5.	Nama	: Cut Salma Farha KF
	Jabatan	: Pemimpin Cabang		Jabatan	: PE Kepatuhan, MR, dan APU PPT
3.	Nama	: Pebriani Nur Sabilla	6.	Nama	: Robby Darmansyah
	Jabatan	: PE Kepala Operasional		Jabatan	: PE IT

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

Tidak ada kepemilikan saham anggota direksi maupun Dekom pada Kelompok Usaha BPR

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Masing-masing anggota dewan komisaris mempunyai saham pada perusahaan lain yaitu PT. Harmoni Nuansa Indah dan PT. Harmoni Anugerah Mulia. Anggota Direksi tidak mempunyai saham pada perusahan lain.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

Masing-masing anggota direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota direksi lain maupun dengan pemegang saham yang juga sebagai anggota Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Dewan Komisaris saling mempunyai hubungan keuangan dalam hal kepemilikan saham pada PT. Harmoni Nuansa Indah dan PT. Harmoni Anugerah Mulia, namun anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain maupun dengan Anggota Direksi

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.13
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.80
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.02
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.90
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.08

G. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta
1.	16/01/2025	2
2.	17/04/2025	2
3.	10/07/2025	2
4.	23/10/2025	2

H. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Herry	4	-	100
2.	Hans Yanuar Gunawan	4	-	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Tidak terdapat penyimpangan internal atau Fraud yang sedang dihadapi ataupun yang telah selesai pada Tahun 2024

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Terdapat 1 (satu) gugatan terkait kredit sindikasi dimana BPR menjadi tergugat dengan perkara gugatan yaitu restrukturisasi dan pembatalan lelang. Namun demikian telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap pada Januari 2026, dengan hasil putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.